

Yogyakarta, Kota Ternyaman di Indonesia

Fasilitas yang sangat lengkap belum menjamin sebuah kota nyaman

Siapa yang tidak kenal dengan Yogyakarta? Sebuah wilayah yang berstatus daerah istimewa yang berdiri sejak tahun 1755 oleh Sultan Hamengku Buwono I dan sempat menjadi ibukota negara ini pada masa revolusi. Terkenal dengan kraton kesultanan dan budaya tradisionalnya yang sangat kental, juga aset-aset lokalnya, seperti batik, jalan Malioboro, Pantai Parangtritis, sampai Tamansari. Pernah terlanda gempa besar di tahun 2007, dengan bantuan internasional dan partisipasi masyarakatnya, sebagian wilayah yang hancur bisa kembali terbangun.

Kota berpenduduk 3,4 juta jiwa di atas wilayah seluas 32,5 km², ini didapuk sebagai kota ternyaman di Indonesia pada Most Liveable City Index yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Perencana (IAP). Mengalahkan 11 kota lainnya yang dinilai berdasarkan persepsi masyarakat atas tujuh aspek kehidupan perkotaan, yaitu fisik kota, kualitas lingkungan, transportasi – aksesibilitas, fasilitas umum dan sosial, utilitas, ekonomi dan sosial.

Most Liveable City Index (MLCI) ini sendiri adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kenyamanan warga kota untuk tinggal menetap dan beraktivitas di suatu kota, ditinjau dari berbagai aspek kehidupan kota. Termasuk aspek kemudahan ke tempat kerja, biaya tinggal, kualitas lingkungan, pelayanan publik dan kualitas interaksi sosial. Berdasarkan Simposium Perkotaan IAP, 2008, tujuh aspek tadi dijabarkan menjadi 25 kriteria. Penentuan indeksnya dilakukan secara *bottom-up*, dengan melakukan pelibatan masyarakat. Baru pertama kali diadakan di tahun 2009 lalu, direncanakan penilaian indeks ini akan diadakan secara reguler setiap tahun.

Survei ini telah memperlihatkan bahwa

aspek penataan kota, ketersediaan ruang terbuka hijau (rth), pencemaran lingkungan, ketersediaan fasilitas orang cacat dan kebersihan adalah hal-hal yang membuat kota dinyatakan nyaman atau tidak oleh warganya. Menurut Bernardus R. Djonoputro, Sekretaris Jenderal IAP, penataan ruang merepresentasikan keteraturan fisik, arah orientasi ruang, tata guna lahan dan keberpihakan publik. "Persepsi masyarakat atas buruknya aspek-aspek tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk mendorong perbaikan dalam penyelenggaraan kota," katanya.

Yogyakarta dinilai paling nyaman atas kriteria hubungan interaksi antar penduduk, fasilitas kesehatan, pendidikan, jaringan telekomunikasi dan ketersediaan listrik. Tapi paling tidak nyaman atas hal ketersediaan fasilitas kaum difabel (cacat), ketersediaan lapangan kerja, pencemaran lingkungan, ketersediaan rth dan penataan kota. Karena itu, IAP menyimpulkan bahwa budaya masyarakat Yogyakarta yang lembut, sopan dan ramah, juga tidak banyak menuntut adalah alasan-alasan tingginya persepsi kenyamanan warga terhadap kotanya. "Tentu juga pencapaian pembangunan kotanya," ujar Bernardus.

Bagaimana sebelas kota lainnya? MLCI 2009 menyatakan bahwa Pontianak adalah kota yang dipersepsikan paling rendah tingkat kenyamanannya. Kota seluas 107,82 km² ini sebagian besar berupa lahan gambut, sehingga berdampak pada keterbatasan lahan pengembangan kota. Juga limitasi bagi pengembangan infrastruktur dan ketersediaan air bersih. Berpenduduk hampir 550 ribu orang, dengan kepadatan 5.045 jiwa/km² (tahun 2008), untuk bisa disamakan dengan kota-kota lain, Pontianak harus melakukannya dengan pendekatan teknologi yang mumpuni.

Oleh: **Nita**

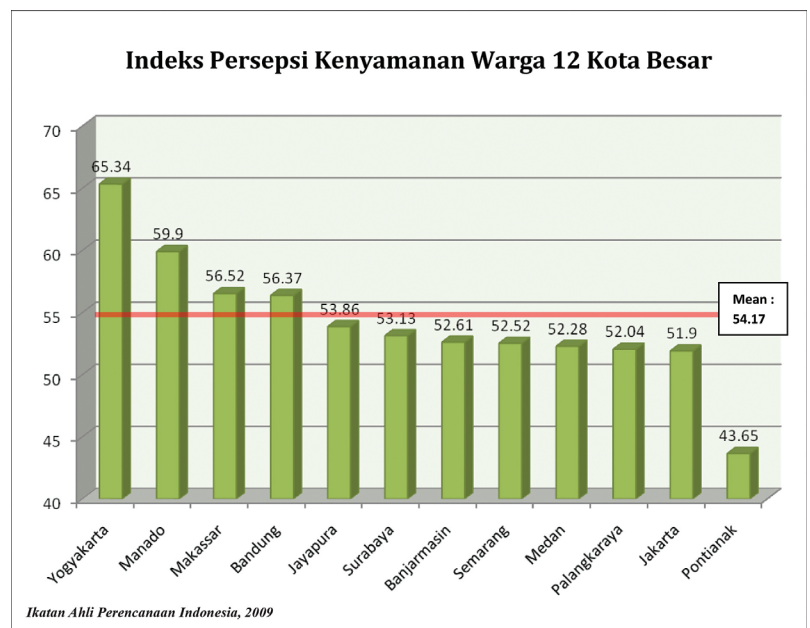
Palangkaraya dipersepsikan sebagai kota yang paling baik penataan ruangnya. Memang masih jauh dari ukuran ideal, tapi ibukota Kalimantan Tengah ini dinilai mempunyai kapasitas akomodasi ruang yang memadai terhadap pertumbuhan penduduknya. Kota yang “baru” berdiri pada tahun 1957 ini (berdasarkan UU Darurat No. 10/1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah) memang disiapkan dan direncanakan secara matang. Dibuka di tengah hutan, sebagai bagian dari rencana pengembangan wilayah Kalimantan. Mempunyai luas 153,6 ribu km² dan sebagian wilayahnya berupa hutan lindung dan konservasi alam, termasuk di dalamnya Taman Nasional Tangkiling, kota ini “hanya” dihuni sekitar 2 juta jiwa.

Untuk aspek tata ruang itu, Bandung mendapat persepsi paling rendah. Kota yang makin padat oleh *factory outlet*, kafe dan hotel kecil ini mendapat persepsi terendah untuk kriteria penataan kota, yaitu hanya 3%. Alias hanya 3% responden yang menganggap tata ruang ibukota Jawa Barat ini baik, selebihnya menyatakan buruk. Angka tersebut adalah nilai terendah dari semua kriteria di semua kota. Hal ini, demikian MLCI, mengindikasikan bahwa banyak warga Bandung sangat tidak puas dengan penataan kotanya. Satu hal yang paling terang adalah komersialisasi kota hingga

Banyak warga Bandung sangat tidak puas dengan penataan kotanya. Satu hal yang paling terang adalah komersialisasi kota hingga merampas ruang-ruang publik dan ini ternyata sangat tidak disukai oleh warganya.

merampas ruang-ruang publik dan ini ternyata sangat tidak disukai oleh warganya.

Walau demikian, Bandung menempati posisi keempat pada indeks ini. Keburukan di aspek tata ruang terkompensasi dengan ketersediaan jaringan telekomunikasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta ketersediaan listrik dan angkutan umum.



Lalu di mana Jakarta? Ibukota negara ini menempati posisi kedua terendah. Kota ini mendapat nilai 100% atas ketersediaan telekomunikasi, dan mendapat nilai tinggi atas fasilitas pendidikan, rekreasi, ketersediaan listrik dan informasi pelayanan publik. Tapi mendapat nilai buruk atas kualitas angkutan, fasilitas kaum *difable*, ketersediaan RTH, kebersihan lingkungan dan ketersediaan lapangan kerja.

Kriteria ketersediaan lapangan kerja di Jakarta ini dipersepsikan paling rendah dari seluruh kota. Menurut IAP ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas ekonomi kotanya sangat tinggi, tapi penciptaan lapangan kerjanya tidak sebanding dengan pertambahan penduduknya yang sangat tinggi. Karena itu tingkat persaingannya

menjadi sangat ketat. Penduduk Jakarta hingga Maret 2009 sendiri berjumlah 8,5 juta jiwa, tapi kompetisi lapangan kerjanya hingga daerah yang lebih luas (Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi). Dan untuk kriteria ini, Jakarta “sejajar” dengan Makassar dan Pontianak, sebaliknya “kalah” dengan Manado, Bandung dan Surabaya. ▲